

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *New Public Management* (NPM)

New Public Management (NPM) secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. NPM berangkat dari gagasan Christopher Hood sebagai awal mula paradigma alternatif. Paradigma alternatif ini menekankan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien yaitu mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas.

NPM berakar dari teori manajemen yang beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik (Mardiasmo, 2000).

Praktik NPM yang mendasari pada teori ekonomi merupakan alasan dilakukannya adopsi sistem akuntansi akrual pada organisasi sektor publik. Dari perspektif teori ekonomi, dikatakan bahwa akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor public dapat ditingkatkan dengan mentransformasikan

proses manajemen, evaluasi, dan pendanaan organisasi sektor publik ke dalam praktik manajemen sektor swasta (Harun dan Kamase) dalam (Herwiyanti,dkk.2017) .

Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan sektor yang modern, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang detail, yang tidak sekedar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual diterapkan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Menurut Christiaens dkk (2001; 2003) reformasi akuntansi pemerintahan sering menjadi langkah pertama reformasi pemerintah dan itulah sebabnya dapat dianggap sebagai kondisi yang penting dan prasyarat bagi keberhasilan reformasi pemerintah lainnya di bawah gelombang transformasi NPM, seperti reformasi organisasi dan manajerial. Oleh karena itu, penerapan yang efektif dan sukses dari reformasi akuntansi berperan penting dan dominan dalam penerapan dan keberhasilan praktik dan teknik NPM lain dalam organisasi publik. Tanpa implementasi yang memadai dan sukses, semua keuntungan, tujuan dan harapan reformasi akan hilang karena fakta bahwa sistem akuntansi yang baru tidak akan dapat memberikan

informasi manajerial dan keuangan yang relevan dan akurat untuk mendukungnya (Christiaens dan Van Peteghem, 2003 dalam Kusuma, 2013).

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif adopsi dan implementasi aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual dan menguji dampak dari berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan.

2.2 Teori Kontijensi (Contingency Theory)

Pendekatan kontijensi (contingency approach) (Govindarajan, 1986) adalah konsep yang menyatakan bahwa tidak ada suatu sistem kontrol terbaik yang dapat diterapkan untuk semua organisasi dan penerapan sistem yang tepat, harus memandang adanya keterlibatan variabel konstektual dimana organisasi tersebut berada. Teori kontijensi (contingency theory) (Otley, 1980), mengasumsi berbagai pola perilaku pemimpin (atau ciri) yang dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan. Pendekatan kontijensi dalam perilaku organisasi adalah lingkungan yang berbeda menyebabkan adanya perilaku yang berbeda pula. Teori kontijensi memotivasi adanya analisis situasi sebelum diambil tindakan dan menghilangkan perilaku yang biasa dilakukan berdasarkan asumsi tentang keperilakuan. Sehingga teori kontijensi dapat digunakan untuk semua pengetahuan yang mutakhir tentang organisasi dengan cara yang paling tepat, karena tindakan yang tepat tergantung pada variabel situasional. Teori kontinjensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi

manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan organisasi untuk berbagai macam tujuan.

Pada pendekatan kontinjensi (contingency approach) terhadap kualitas laporan keuangan yang berkualitas bisa memberikan kontribusi yang positif, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas juga sangat menentukan dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi standar peraturan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontinjensi dalam Teknologi Informasi juga berpengaruh dalam menganalisis sistem akuntansi untuk memberikan informasi yang akurat, sehingga implementasi standar akuntansi pemerintah bisa tercapai dengan baik. Pendekatan terhadap komitmen organisasi yang memerlukan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja yang maksimal, juga merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 tahun 2010 meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), laporan keuangan yang harus disajikan adalah :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL merupakan laporan pertanggungjawaban anggaran (*budgetary report*), sedangkan laporan

yang lainnya merupakan laporan keuangan (*financial statement*). SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Mardiasmo (2004), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, maka dengan kata lain Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu syarat yang mempunyai kekuatan hukum didalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Menurut (Wijaya, 2008), standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah (KSAP, 2005).

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.3.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementeriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinasdinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas. Menurut (Fakhrurazi, 2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi di mana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.4 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PP No. 71 Tahun 2010)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengatur Standar Akuntansi Pemerintah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*), sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akuntansi adalah basis akrual. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 pasal 1 ayat (10) yang dimaksud dengan Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Amanat dari peraturan ini pula yang mengharuskan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Indonesia sendiri juga mengalami kendala dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini. Beberapa kendala yang dihadapi

oleh pemerintah daerah dalam penerapan SAP, diantaranya adalah kualitas SDM yang belum memadai. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM ini sebenarnya sudah mulai dilakukan beberapa cara, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Beberapa cara tersebut berupa pendampingan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan reviu laporan keuangan, pelatihan penyusunan pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), serta program pemberian beasiswa bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan akuntansi sektor pemerintahan. Selain masalah SDM, kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah aspek regulasi. Inkonsistensi dalam penerbitan peraturan perundangan terkait akuntansi pemerintahan mengakibatkan pemerintah daerah kehilangan selera untuk melaksanakan akuntansi. Pemerintah daerah merasa dijadikan objek penderita karena beberapa petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan tidak sejalan.

Menurut (Suwanda, 2014), ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual, diantaranya menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah, membuat sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) dan membuat Bagan Akun Standar (BAS).

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah

daerah mengatur dasar pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi asset, kewajiban, eukitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. SAPD merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap dan digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.

2.5 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah harta/asset paling berharga dan penting yang dimiliki organisasi/perusahaan, karena keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia (Sedarmayanti, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang ada dalam suatu organisasi dan bukan sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu

system dimana tiap-tiap karyawan merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi (Matindas, 2002).

Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Afrianti, 2011). Menurut (Aldiani, 2005), pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.

2.6 Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, software dan lain lain . Menurut (Mulyono, 2007) perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas input, proses dan output dalam sebuah sitem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari computer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan output serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut.

Sedangkan perangkat lunak menurut Mulyono (2007) merupakan perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang berisi program serta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Serta aplikasi yang dibutuhkan seperti aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah terpasang dengan baik di komputer yang telah disediakan. Jaringan internet juga menjadi salah satu sarana pendukung dalam proses penginputan data menggunakan aplikasi SIMDA ini.

2.7 Komitmen

(Robbins, 2003) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dengan kata lain komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Kemudian dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) penerima dana Dekonsentrasi/ Tugas Perbantuan.

(Mathias, 2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa komitmen merupakan suatu bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggungjawab dalam upaya mencapai tujuan organisasi. (Luthan, 2006) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi, merupakan suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa temuan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan standar akuntansi berbasis akrual dan kualitas laporan keuangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang beragam. Berikut ini adalah tinjauan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yahya, 2018) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis data, hasil yang diperoleh bahwa sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan SAP berbasis akrual. Sumber daya manusia diharapkan dapat selalu ditingkatkan dengan baik; kualitas sumber daya manusia merupakan tolok ukur untuk mensukseskan pelaksanaan SAP berbasis akrual ini. Fasilitas pendukung yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah software atau hardware yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan dalam

penerapan berbasis akrual SAP. Namun, masalahnya adalah bahwa fasilitas pendukung tidak berpengaruh pada pelaksanaan SAP berbasis akrual yang dilakukan di lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, di beberapa kabupaten yang menjadi objek penelitian, masih ada penggunaan aplikasi SAP berbasis akrual yang tidak efektif, dan bahkan beberapa masih belum memiliki aplikasi. Adopsi SAP berbasis manual sangat mempengaruhi pelaksanaan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah. Penerapan akrual berbasis SAP secara manual akan memberikan bantuan kepada setiap petugas keuangan sebelum mereka menerapkan sistem komputerisasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Yulianto, 2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hal ini ditunjukkan dari terbatasnya kemampuan pegawai yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi, tidak semua yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih diperlukan untuk mendukung implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap SAP Berbasis Akrual, penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya, serta

dikarenakan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah belum memiliki komitmen organisasi yang kuat untuk membantu organisasi dalam menjalani perubahan. Penerapan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap SAP Berbasis Akrua. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem informasi tidak akan mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrua, tinggi rendahnya sistem pengendalian intern akan mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewi, 2017) menyatakan bahwa secara parsial kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua pada SKPD Kabupaten Bangli. Secara simultan variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Purwaningrum, 2017) menyatakan bahwa Kualitas SDM tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Menunjukkan bahwa terbatasnya kemampuan pegawai yang bekerja dibidang keuangan/akuntansi, tidak semua yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi sehingga pelatihan mengenai penerapan standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual masih diperlukan untuk mendukung penerapannya berjalan baik dan pengalaman kerja juga membuat kemahiran dalam pekerjaannya. Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Menunjukkan bahwa kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, maka sistem informasi akuntansi dapat dilaksanakan cermat, tepat akurat. Komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Menunjukkan penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya. komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Menunjukkan berarti masih kurang efektifnya komunikasi pimpinan terhadap bawahannya dalam sosialisasi penerapan SAP yang disampaikan ke pegawainya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marsdenia (2016) menyatakan bahwa Faktor komitmen SDM terhadap organisasi mempengaruhi keberhasilan implementasi basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Kota Bogor. Regulator dalam hal ini bisa mengatur supaya komitmen pada setiap SDM yang terkait Akuntansi dan Keuangan bisa memiliki rasa bertanggungjawab atas tercapainya tujuan dari organisasi. SDM Pemerintahan kota Bogor menurut persepsi SDM pemerintahan Kota Bogor tidak berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Berdasarkan data hanya 50% yang memang background terkait

akuntansi, sedangkan yang lain ada yang manajemen, bahasa dan hukum. Informasi/Data menurut Kabid Akuntansi Pemkot Bogor. Faktor komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi berbasis akrual. komunikasi yang berkesinambungan baik antara pemerintahan pusat dan daerah, mau pun komunikasi antara pimpinan pemerintahan Kota Bogor dengan organisasi pemerintahan dibawahnya baik sekda (Sekretaris Daerah), Eselon 1, 2 dan 3, baik antar Badan, Instansi serta SKPD dan PPKD dalam rangka mensukseskan implementasi laporan keuangan berbasis akrual. Sarana pendukung tidak mempengaruhi keberhasilan implementasi laporan keuangan Daerah pemerintah Kota Bogor. Sarana pendukung tidak mempengaruhi keberhasilan adanya dropping software dari BPKP.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Yadhar, Idha (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (X1) 2. Fasilitas Pendukung (X2) 3. Pelaksanaan SAP berbasis Akrual (Y) 	Kompetensi SDM telah mempengaruhi pelaksanaan SAP berbasis akrual, Fasilitas Pendukung belum berpengaruh terhadap pelaksanaan SAP berbasis akrual, dan pelaksanaan SAP berbasis akrual sebagai system manual memiliki efek terhadap implementasi SAP berbasis akrual
2.	Yulianto (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Dayaa Manusia (X1) 2. Komitmen Organisasi (X2) 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) 4. Sistem Pengendalian Intern (X4) 5. Implementasi SAP berbasis Akrual (Y) 	Penerapan Sistem Pengendalian SAP berbasis Akrual berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAP berbasis Akrual, Sedangkan Kompetensi SDM, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.

3.	Dewi (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (X1) 2. Komitmen Organisasi (X2) 3. Sistem Pengendalian Intern (X3) 4. Penerapan SAP (Y) 	<p>secara parsial, variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua di SKPD Kabupaten Bangli, besarnya kontribusi variabel independen adalah sebesar 78,1%. Secara simultan, variabel kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis Akrua di SKPD Kabupaten Bangli.</p>
4.	Purwaningrum, Idha (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) 2. Komitmen Organisasi (X2) 3. Teknologi Informasi (X3) 4. Komunikasi (X4) 5. Penerapan SAP (Y) 	<p>variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Sedangkan kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrua.</p>
5.	Marsdenia (2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Organisasi (X1) 2. Sumber Daya Manusia (X2) 3. Komunikasi (X3) 4. Perangkat Penunjang (X4) 5. Implementasi berbasis Akrua (Y) 	<p>Komitmen Organisasi dan Komunikasi terbukti mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua, tetapi untuk Faktor SDM dan faktor Sarana pendukung tidak mempengaruhi Keberhasilan Implementasi SAP Berbasis akrua.</p>

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh antara sumber daya manusia dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual

Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini didukung oleh Krumwiede (dalam Kusuma, 2013) menunjukkan pelatihan yang memadai memiliki efek positif terhadap kesuksesan adopsi sistem akuntansi. Demikian pula menurut Brusca (dalam Kusuma, 2013) yang menunjukkan bahwa transisi dari akuntansi berbasis kas menuju basis akrual membutuhkan biaya pelatihan yang signifikan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Idha (2018) dan Dewi (2017) bahwa Sumber Daya Manusia mampu menjelaskan kesuksesan penerapan SAP berbasis akrual.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual ke basis akrual penuh (*full accrual*). Semakin baik kualitas SDM dan ketersediaannya dalam sektor pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrual semakin baik. Hipotesis yang dibangun untuk kualitas SDM pada penelitian ini adalah:

H1 : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

2.10.2 Pengaruh antara teknologi informasi dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual

Purwaningrum (2017) menjelaskan bahwa tentang teknologi informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru dari pada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah, Kusuma dalam Purwaningrum (2017). Ketersediaan komputer (hardware) dan program-program akuntansi pemerintahan (software) akan sangat membantu OPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem informasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan sebuah perubahan dalam organisasi, dalam hal ini yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual ke basis akrual penuh (*full accrual*). Teknologi informasi akan sangat membantu pemerintah daerah untuk lebih cepat memproses pengolahan data, para pegawainya tidak akan melaksanakan tugas dengan cara manual. Semakin baik sistem informasi yang digunakan pada pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pengimplementasian basis akrual ini Nia (2018). Hipotesis yang dibangun untuk teknologi informasi pada penelitian ini adalah:

H2 : Sistem informasi berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.

2.10.3 Pengaruh antara komitmen organisasi dengan kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual

Menurut Robbins (2002:15), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan emihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Aldiani dalam Dewi 2017).

Komitmen organisasi berpengaruh pada keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada kabupaten Bengli menurut penelitian Dewi (2017). Sedangkan penelitian menurut Yulianto (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini menunjukkan penerapan SAP yang dilakukan sudah menjadi suatu peraturan atau prosedur yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan sehingga pegawai tinggal melaksanakannya dengan rutinitasnya. Hal ini menandakan belum terdapat komitmen organisasi yang tinggi untuk menyukseskan penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan kedua penelitian yang tidak mempunyai hasil yang sama tersebut, maka penulis akan meenduga hipotesa sebagai berikut:

H3 : Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual.